

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang memiliki tugas dan kewajiban dalam mengelola keuangan daerah serta memberikan pelayanan terhadap publik. Adanya kewajiban tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap publik (Sarwono & Munari, 2022). Laporan keuangan yang berkualitas membantu para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan manfaat dalam upaya pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat (Maulana et al., 2020). Karena apabila laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah buruk atau tidak berkualitas maka akan menimbulkan implikasi yang negatif, yaitu salah satunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik (pemerintah) dan menyebabkan kualitas kebijakan yang diputuskan buruk. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah merupakan suatu cerminan dari baik atau buruknya penilaian terhadap suatu pemerintah daerah (Ifanka & Sari, 2022).

Laporan keuangan pemerintah daerah dihasilkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kemudian dijadikan dasar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan terdiri dari Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan pemerintah terdiri

dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas laporan keuangan (CALK) (Antika et al., 2020). Dalam proses penyusunannya laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2010. Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan pemerintah yang ideal yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat katakarakteristik tersebut merupakan penentu untuk menilai kualitas dari laporan keuangan pemerintah (Nasution, 2022).

Menurut (Ariska et al., 2019) Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan bentuk gabungan dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) yang telah digunakan. Laporan keuangan yang telah dibuat dari masing-masing SKPD tersebut selanjutnya dikonsolidasikan kepada pihak satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) untuk kemudian dijadikan laporan keuangan daerah (LKPD). Menurut (Maharani, 2017) setelah dilakukannya proses konsolidasi dan menjadi Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) maka selanjutnya laporan tersebut masih perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang yaitu badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk diberikan opini sebelum nantinya di publikasikan.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD) yang telah diperiksa tersebut (Rahmayanti, 2018). Sehingga secara tidak langsung laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tercerimin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Karsana & Suaryana, 2017). Opini yang dinayatakan oleh pihak BPK sangatlah penting bagi para pengguna LKPD, adapun para pengguna LKPD yaitu masyarakat, pimpinan/anggota DPRD, lembaga pemberi pinjaman dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta internal pemerintah daerah itu sendiri (Maharani, 2017).

Masalah mengenai kualitas dari laporan keuangan kini semakin hangat untuk dibahas. Bersumber dari bpk.go.id, (2022) “Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 juga dihadiri oleh Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, **Daniel Lumban Tobing**, Pimpinan dan Anggota DPD, serta Sekretaris Jenderal BPK, **Bahtiar Arif**, dan pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPK. Sebelumnya, IHPS I Tahun 2022 juga telah disampaikan kepada DPR dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/10). IHPS I Tahun 2022 ini memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan (atau LHP), yang terdiri atas 682 LHP Keuangan, 41 LHP Kinerja, dan 48 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Penyampaian IHPS oleh BPK mengungkap adanya 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp18,37 triliun. Sebanyak 51,8% atau 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp17,33 triliun. Kemudian, 44,8% atau 7.020 dari permasalahan tersebut berkaitan dengan kelemahan Sistem

Pengendalian Intern (SPI), dan 3,4% atau 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,04 triliun. Banyaknya kasus-kasus tentang permasalahan dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut menjadi suatu isu hangat yang perlu untuk dikaji lebih dalam.

Menurut (Sari, 2022) Pembuatan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan pada pemerintah daerah inilah yang yang menjadi penyebab masih rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Rendahnya kualitas dari laporan keuangan dapat dilihat dengan adanya fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang menyatakan bahwa masih ditemukannya pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini dengan strata tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Pamungkas, 2018).

Menurut (Erawati & Abdulhadi, 2018) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, lengkap, dan akurat, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan sebuah sistem aplikasi yang dapat menunjang dalam proses pembuatan laporan keuangan. Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Jadi implementasi merupakan tindakan yang harus mengikuti seluruh pemikiran awal agar dapat sungguh-sungguh mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung tercapainya akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyusun suatu program aplikasi.

Program aplikasi yang dikembangkan oleh BPKB tersebut ialah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Aplikasi SIMDA ini merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan (Ariska et al., 2019).

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh (BPKP) ini mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006 yang merupakan suatu produk teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut (Ramayanto & Reinelda, 2022) Aplikasi SIMDA mampu menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komperhensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Penerapan terkait dengan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah wajib untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya (Admaja & Wahyundaru, 2020). Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan proses penyusunan perencanaan dan

penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD (Ramayanto & Reinelda 2022). Selain itu dengan diterapkannya aplikasi SIMDA ini juga dapat meningkatkan perolehan opini BPK terhadap LKPD yang dihasilkan.

Bersumber dari bpkp.go.id, (2019) menjelaskan bahwa “Sistem informasi Manajemen Keuangan Daerah atau SIMDA Keuangan sudah digunakan lebih dari 400 pemerintah daerah di Indonesia. Bahkan, sekarang dengan berlakunya akuntansi pemerintahan berbasis akrual basis, pemda yang menggunakan *SIMDA* akrual basis sudah hampir mencapai 500 Pemda.

Subekti dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan yang bersifat informal ini merupakan pertemuan lanjutan dalam rangka menyamakan persepsi antara tim BPK dan BPKP untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi dalam Aplikasi SIMDA yang diterapkan di pemda-pemda. Subekti menambahkan, “ Ketika belajar menyelam awalnya keluhan disebabkan alatnya, namun jika sudah menguasai, kita baru tahu dari mana sebenarnya permasalahan muncul.

Sebagai upaya keberhasilan terhadap penerapan suatu sistem aplikasi maka dibutuhkan sumber daya manusia yang tentunya berkompeten. Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti, 2017) menjelaskan tentang kompetensi yang merupakan kemampuan dari seseorang untuk menghasilkan sesuatu pada tingkat yang memuaskan di lingkungan kerja, termasuk diantaranya yaitu kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dalam upaya meningkatkan manfaat yang telah disepakati.

Kompetensi dapat dikatakan sebagai karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*), untuk dapat melaksanakan pekerjaannya. Apabila sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tentunya tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Menurut (Irafah & Nurmala Sari, 2020) Sumber daya manusia yang berkompoten harus sesuai dengan bidangnya. Karnea untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna, maka dibutuhkan pegawai dengan kompetensi yang mumpuni dan sistem akuntansi serta teknologi informasi yang memadai. Latar belakang pendidikan yang relevan, intensitas pelatihan, dan ketrampilan merupakan cerminan dari kompetensi yang dimiliki oleh SDM (Subhi & Yuhertiana, 2021).

Keterbatasan masalah kompetensi pegawai yang melakukan pengelolaan keuangan di setiap SKPD barangkali dapat difasilitasi oleh anggota Dewan. Agar setiap SKPD bisa membuat LKPD, harus didukung oleh SDM yang kompeten. Karena dari penganggaran yang paling penting bagi daerah adalah investasi pada sumber daya manusia (SDM). Kalau SDM-nya bagus diyakini pengelolaan keuangannya juga akan baik. “Saya melihat belum ada yang signifikan dari setiap kabupaten termasuk Kabupaten Labura untuk investasi terhadap peningkatan kompetensi SDM. Inilah dua hal yang perlu disampaikan kepada anggota dewan, dimana DPRD dapat mendorong SKPD untuk secara aktif dan proaktif bisa memproses laporan keuangannya secara baik menggunakan SIMDA Keuangan yang sudah disediakan BPKP,” harap Mulyana (btkp.go.id, 2016).

Selain penerapan sistem aplikasi dan sumber daya manusia yang berkompeten adanya dukungan dari manajemen puncak juga turut mendukung terhadap keberhasilan dan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Sanga & Dince, 2022) Dukungan dari manajemen puncak dapat ditetapkan dengan memberikan motivasi kepada karyawannya, melakukan pengawasan kerja, ataupun mengadakan pelatihan-pelatihan. Dengan adanya dukungan yang diberikan dari manajemen puncak tentunya akan berdampak positif terhadap proses pembuatan laporan keuangan, sehingga diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas (Soegihin et al., 2021).

Menurut (Haruna, 2019) sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan, maka pegawai dituntut untuk mempunyai kinerja yang bagus. Khususnya pada instansi pemerintah bahwa penekanan pada kinerja pegawai terdiri dari dua faktor, yakni kedisiplinan dan motivasi pegawai. Selama proses menjalankan pekerjaannya seorang pegawai tentunya tidak lepas dari dukungan, perintah, serta aturan dari seorang atasan. Menurut (Asir et al., 2022) Motivasi merupakan pengendalian proses perilaku yang berupa mengarahkan, menjaga, membangkitkan, dan menunjukkan intensitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengaruh dari dukungan manajemen puncak dan sumber daya manusia yang berkompeten menjadikan faktor penting yang dapat menentukan efektivitas dari penerimaan sistem aplikasi sehingga dapat menghasilkan *output* sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi (Wulandari & Juliarsa, 2017)

Pemerintah Kabupaten Magetan periode 2017-2021 telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. LKPD Kabupaten Magetan pada periode tersebut telah

menyajikan laporan keuangan secara wajar material artinya PEMDA Kabupaten Magetan menyajikan laporan keuangan dengan baik, namun disisi lain masih ditemukan beberapa pihak yang melakukan kecurangan. Artinya kemungkinan terindikasi faktor-faktor yang dianggap mampu mempengaruhi selama proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, sehingga menimbulkan turunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kabupaten Magetan.

Adapun kasus yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten Magetan yaitu Kepala Bappeda Kabupaten Magetan telah terbukti korupsi, yaitu dengan melakukan kecurangan dana pengadaan sepatu PNS senilai 1,2 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 100 juta lebih. Kasus tersebut hampir mirip dengan kasus korupsi E-KTP, karena kasus tersebut terjadi secara sistematis (kompas.com, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu (Zalni, 2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntansi Akruial Dan Implementasi Simda Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Kendari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan, penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan, implementasi SIMDA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Karsana & Suaryana, 2017) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terbukti

berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, Kompetensi sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, Sistem pengendalian intern terbukti berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terhadap hasil yang diberikan serta fenomena-fenomena yang peneliti temukan pada pemerintahan kabupaten Magetan yaitu diantaranya kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang mendukung, peran serta dukungan manajemen puncak yang belum optimal, keterbatasan dalam menggunakan suatu sistem aplikasi yang tentunya akan mempengaruhi kualitas dari hasil laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tersebut sehingga memotivasi penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan ?
2. Apakah Dukungan Manajemen Puncak berpengaruh terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Pemeirntah Daerah Kabupaten Magetan?

3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan?
4. Apakah Dukungan Manajemen Puncak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan?
5. Apakah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap sistem informasi manajemen daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
2. Untuk menguji dan membuktikan dukungan manajemen puncak terhadap sistem informasi manajemen daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

5. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemeirntah Daerah Kabupaten Magetan

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan riset yang berkaitan dengan pemerintah daerah

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature dala melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah sebagai langkah perbaikan bagi pemerintah daerah dalam kualitas laporan keuangan.